

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran umat Islam dalam mengendalikan politik di Indonesia selalu hadir dari sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Pergolakan politik di Indonesia bukanlah hal yang baru. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan politik sudah terjadi sejak awal Indonesia merdeka. Baik itu polemik politik yang terjadi antar partai dengan partai lainnya, antara partai dengan negara, maupun partai dengan individu. Salah satu contoh polemik politik yang terjadi pada awal kemerdekaan, adalah pertarungan partai Islam yang tergabung pada organisasi Masyumi dengan pemerintahan orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Dengan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pengaruh dan peran politik Masyumi semakin melemah. Soekarno memandang bahwasannya partai politik itu cukup satu, jangan berjilid-jilid. Karena menurut Nya apabila partai lebih satu akan membingungkan masa. Puncaknya pada tahun 1960, melalui Surat Keputusan Presiden Soekarno No.200 Tahun 1960 partai Masyumi resmi dibubarkan.¹

Polemik-polemik antara agama dan politik di Indonesia terus berlanjut hingga masa reformasi. Polemik tersebut susah untuk dihindarinya, berhubung Indonesia sebagai negara dengan mayoritas 99% beragama Islam. Sehingga Umat Islam selalu memainkan peran dalam kancah politik di Indonesia. Sikap umat Islam Indonesia, dalam menyikapi masalah-masalah politik di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak sedikit, banyak juga *rival-rival* politik di luar sana yang

¹ Abdul Rahman, "Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama", *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, n.d., 164.

memanfaatkan situasi pergolakan politik ini. Sehingga sedikit demi sedikit, mereka dapat memanfaatkan dengan memasukan visi-misinya melalui transformasi ideology.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin pesat. Salah satu dampak dari pesatnya kemajuan teknologi, berdampak juga terhadap kemajuan media masa. Terlebih di era modern ini, media sosial dengan berbagai varian aplikasi yang ada di dalamnya, sudah merasuk ke berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu narasi yang mempengaruhi gerak budaya dan politik pada masyarakat muslim, khususnya di Indonesia adalah dimungkinkan karena media modern.²

Dampak dari media modern, salah satunya adalah melutusnya peristiwa Aksi Bela Islam 212 Pada tahun 2016 di Jakarta. Kala itu, terjadi sebuah peristiwa besar yang melibatkan jutaan umat Muslim Indonesia, yang disebabkan oleh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu mengenai Surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok yang dinilai menghina Kitab Suci Al-Quran tersebut viral, setelah diupload oleh Buni Yuni dalam akun youtubnya pada tanggal 6 Oktober 2016.³

Sebelum terjadinya Aksi 212, umat Islam Indonesia melakukan Aksi pada 14 Oktober 2021. Aksi ini dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam Jilid I. setelah keluarnya Fatwa MUI pada tanggal 11 Oktober 2021, masyarakat berharap besar, aparat untuk segera menindak Ahok. Hanya saja, respon pemerintah kala itu dinilai lambat. Sehingga mengundang amarah masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim Indonesia. Dua hari setelah keluarnya Fatwa MUI yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021, meletuslah Aksi Bela Islam Jilid. Ribuan umat Islam kala itu, yang terdiri dari habaib,

² Setyaningrum Pamungkas Arie, Octaviani Gita, *Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunikasi Luring*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 4 No.2, Agustus 2017, hlm 65.

³ Viva.Co.ID, “Pernyataan Lengkap Ahok Saat Sebut Surah Al-Maidah Ayat 51”, 2016, <https://youtube.be/jceY6fieHWI>.

ulama, ormas-ormas Islam, santri dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Ahok dipenjara.

Melihat reaksi umat Islam yang semakin memanas, pada tanggal 24 Oktober 2016 Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Di Mabes Polri Ahok menyampaikan klarifikasi apa yang diucapkannya ketika di Kepulauan Seribu. Dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang merasa tersakiti dengan perkataannya. Melihat belum adanya tindakan serius dari pemerintah, kondisi pun semakin memanas. Imam Besar PFI Habib Rizik Shihab, menyeru umat Islam untuk melakukan demonstrasi yang lebih besar lagi. Aksi lanjutan tersebut akan digelar pada 4 November 2016. Habib Rizik berharap NU dan Muhammadiyah sebagai ormas besar besar untuk ikut gabung dalam aksi yang akan diselenggarakan tanggal 4 November itu.⁴

Aksi lanjutan yang digelar pada 4 November atau 411 dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam Jilid II. Sebelum digelar Aksi Jilid II, beredar selebaran di mesjid-mesjid yang berisi ajakan “Jihad Konstitusi” bela agama dan negara. Adapun isi selebaran tersebut adalah sebagai berikut :

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menyelenggarakan aksi besar-besaran terkait penodaan yang dilakukan oleh Gubernur DKI di Kepulauan Seribu beberapa hari yang lalu. Hal ini dilakukan karena Ahok: menista agama – menodai al-qur’an melecehkan ulama – menghina umat Islam. Aksi ini sendiri bukan aksi sara & politik pilkada , tapi ini aksi penegakan hukum.

Secara jumlah masa Aksi 411 lebih banyak dari Aksi Jilid I yang digelar pada 16 Oktober 2016. Prediksi masa yang hadir kala itu sekitar dua juta orang. Aksi Jilid II yang melibatkan jutaan masa tersebut, mendapat perhatian pemerintah. Sehingga kala itu, Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi kepada Prabowo, sebagai antisipatif untuk meredam situasi masa. Diskusi pun dilakukan oleh Jokowi dengan

⁴ Dkk Isamntoro Dwi Yuwono, *Gara-Gara Ahok Dari Kegaduhan ke Kegaduhan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2017), 319–23.

Prabowo selama dua jam lamanya. Hasil dari diskusi tersebut, Prabowo siap untuk membantu memberi masukan terkait kemanan untuk menghadapi Aksi 4 November yang akan digelar nanti.⁵

Hasil perjuangan dengan menggelar dua kali Aksi tersebut, keluarnya putusan dari Bareskrim Polri. Pada tanggal 16 November 2016 Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Kabareskrim memberi pernyataan, terdapat perbedaan diantara 27 team yang ikut rapat tersebut. Tetapi pada akhirnya Bareskrim mengambil keputusan dengan mengambil suara terbanyak. Bahwa Ahok terjerat Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan elektronik (ITE). Meski sudah keluaran putusan dari Bareskrim, GNPF MUI, di bawah komando Habib Rizik tetap akan bersi keras untuk melakukan Aksi Bela Islam Jilid III. Aksi yang dikenal sebutan Aksi 212 tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016, dengan mengundang masa yang lebih besar lagi. Adapun Tuntunannya adalah agar secepatnya Ahok ditangkap dan dipenjarakan.⁶

Aksi Bela Islam 212 inilah yang akan menjadi focus pembahasan penelitian ini. Penelitian ini, akan membahas potret dibalik gerakan Aksi 212. Hemat hipotesa penulis bahwa gerakan ABI 212 di indikasi sudah menjelma menjadi sebuah gerakan politik. Bagaimana pun juga Aksi Jilid III sudah tidak murni lagi sebagai gerakan keagamaan. Apabila melihat situasi politik di Jakarta kala itu. Dalam waktu dekat, yaitu pertengahan bulan tahun 2017, Ibu Kota Jakarta akan menggelar pesta demokrasi pemilu Gubernur DKI Jakarta. Keadaan inilah, oleh para aktor-aktor politik dijadikan sebagai momentum untuk menarik suara masyarakat, dalam mengantarkan kemenangan calon yang diusungnya. Bahkan tidak brehenti disitu, PA 212 membentuk ijma untuk mengusul calon Prsiden di tahun 2019.

⁵ Isamntoro Dwi Yuwono, hlm 323.

⁶ Travellio Ryan Agusta, "Gerakan Politik Dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 dan 212 Tahun 2016)" (PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA, 2020), 40.

Sejak era Orde Baru sampai periode Jokowi memimpin, sedikitnya ada tiga sampai empat Islam menjadi kekuatan politik. Baik itu agama tersebut hanya dijadikan alat agar tidak dianggap hifobia terhadap Islam seperti halnya Soeharto pada akhir kepemimpinannya. Pada akhir kepemimpinannya, Soeharto mendirikan ICMI, agar terlihat peduli terhadap membangun Islam sebagai agama mayoritas. Sehingga kala itu *viral* istilah *ijo royo-royo*. Dengan hadirnya ICMI masuk ke dalam tubuh birokrasi setidaknya ada Islamisasi pemerintah Orde Baru. Meski Gusdur menyebut gerakan yang dilakukan oleh ICMI adalah gerakan sekterianisme atau gerakan *midle class*.⁷

Menurut pernyataan salah satu peserta Aksi 212, tidak bisa menutup mata bahwa Aksi 212 tersebut terdapat unsur-unsur politik. Menurut Nya, salah motivasi ia untuk berangkat Aksi adalah karena ada isu pada Pemilu 2017 nanti Ahok akan naik mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Salah satu cara untuk menjegalnya adalah dengan Aksi 212 tersebut. Meski pada waktu itu, ia belum tahu siapa calon yang akan naik dari umat Islam sendiri, yang akan menjadi *rival* Ahok di pemilu DKI nanti.⁸

Bahkan menurut pakar politik Saeful Mujani, ada dua faktor yang membuat protes sosial secara besar-besaran itu terjadi: *pertama*, adanya kesempatan politik, dalam hal ini ada persaingan dalam Pilkada DKI Jakarta. Adanya Konestsasi dalam Pilkada tersebut menjadikan pintu bagi protes sosial menjadi terbuka. *Kedua*, adanya orang yang berkepentingan untuk mobilisasi masa. Saiful menjelaskan, faktor Pilkada saja tidak cukup untuk membuat gerakan sosial jika tidak ada organisasi atau orang-orang yang memoblisasi masa. Jangan anggap kejadian ini, sebagai sebuah manifesasi kemarahan begitu saja.⁹

Setelah melihat pemaparan diatas. Selanjutnya penulis akan menjelaskan, batasan-batasan Penelitian ini akan fokus pada aksi jilid III, yaitu Aksi 212. Adapun

⁷ Iswandi Syahputra Ahmad Doli Kurnia, *Aksi Bela Islam 212 Gerakan Hati Kekuatan Bangsa* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 65.

⁸ Haikal, 48 tahun, Peserta Aksi Bela Islam 212, Wawancara, tanggal 01 November 2021.

⁹ Hermawan Bayu, "Pakar: Aksi Bela Islam II Jadi Besar Karena Dua Fakto", *Republika.co.id*, 2016.

alasan mengapa mengambil penelitian ini pada Jilid III . Hemat penulis, karena Aksi 212 inilah yang menjadi *framing* di masyarakat dan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan aksi jilid lainnya. Bahkan penobatan alumni gerakannya pun *dinisbatkan* pada nama 212. Dan alumni 212 inilah yang memainkan peran politik selanjutnya setelah kontes politik pemilu Jakarta berhasil dimenangkan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, hemat penulis ada tiga pertanyaan yang akan diajukan dalam perumusan masalah tersebut. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Terjadinya Gerakan Aksi Bela Islam 212?
- b. Bagaimana Potret Dibalik Gerakan Aksi Bela Islam 212?
- c. Bagaimana Dampak dari Aksi Bela Islam 212 Terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian dengan judul Gerakan Politik Aksi Bela Islam 212 Tahun 2016 ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pembahasan rumusan masalah di atas. Apabila diuraikan secara luas, tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua tujuan. Pertama tujuan secara praktis dan tujuan secara akademis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian proposal ilmiah ini memiliki tujuan sebagai syarat kelulusan Pascasarjana, yaitu untuk meraih gelar Magister Humaniora pada prodi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Tujuan Akademis

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana melihat fenomena Aksi 212, dari sebuah gerakan keagamaan menjadi sebuah gerakan politik. Hemat penulis Aksi yang melibatkan jutaan orang tersebut, bukan lagi sebatas gerakan keagamaan semata. Terlebih di pertengahan bulan 2017 Jakarta akan melaksanakan kontes demokrasi pemilihan Gubernur. dalam gerakan tersebut, tentu adanya aktor-aktor politik yang memainkan peran untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Seorang sejawaran dalam meneliti suatu peristiwa sejarah harus berbasis fakta dan data, Baik itu primer maupun sekunder. Dalam meneliti peristiwa Aksi 212 tersebut, penulis menggunakan ilmu bantu lain, salah satunya ilmu sosial sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah khazanah pengetahuan sejarah di kemudian hari, baik secara lokal maupun nasional. . Karena tidak bisa dipungkiri, peristiwa Aksi Bela Islam 212 tersebut akan menjadi sejarah besar bangsa Indonesia di kemudian hari.

2. Manfaat Akademis

Adapun secara akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber acuan bagi para penliti selanjutnya yang akan membahas peristiwa Aksi 212. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkn menjadi pengetahuan tambahan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca dalam memahamai hal-hal berikut ini :

- a. Mengetahui perubahan gerakan Aksi Bela Islam yang mulanya sebagai gerakan murni kegamaan dan berubah menjadi sebuah gerakan politik

- b. Mengetahui proses terjadinya Aksi Bela Islam 212 yang melibatkan sekitar tujuh juta orang
- c. Bagaimana Dampak dari Aksi Bela Islam 212 Terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019

E. Kajian Pustaka

Pada sebuah penelitian, Kajian Pustaka sangat diperlukan. Perlunya ada Kajian Pustaka adalah Untuk menghindari plagiarisme serta meminimalisir kesamaan baik itu isi maupun objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, Kajian Pustaka juga diperlukan sebagai bahan informasi untuk melengkapi data penelitian.¹⁰ Adapun beberapa tulisan yang penulis temukan, untuk melengkapi data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Buku bunga rampai yang berjudul “Cahaya di Langit Jakarta (Bela Islam)”. Buku ini kumpulan tulisan dari pelaku para tokoh penggerak aksi bela Islam seperti Habib Rizik, Bchtiar Nasir, dan lainnya sebagainya serta saksi-saksi yang menyaksikan langsung Aksi Bela Islam 212. Buku ini menjelaskan dari mulai Buni Yani dilaporkan sebagai tersangka karena dianggap melanggar UU ITE, perjuangan para peserta aksi dalam menolong satu dan lainnya, pembentukan ekonomi umat dengan membuat koperasi syariah dan 212 mart serta lain sebagainya.
2. Buku dengan judul “Rahasia Tak Terungkap 212, Dari Ciamis Untuk Dunia”. Buku ini ditulis oleh K.H.Nonop Hanafi. Ia merupakan pimpinan dan pelopor *longmarch* Ciamis-Jakarta. Dalam buku ini dijelaskan mulai dari latarbelakang para peserta Ciamis sampai bertekad berani jalan kaki dari Ciamis-Jakarta, perjuangan para kafilah Ciamis yang terdiri dari para

¹⁰ Novi Andika Putri, “Budaya Indis Pada Busana Kebaya Di Priangan Tahun 1900-1942” (Sejarah Peradaban Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 10.

santri Ciamis, antusiasme masyarakat, hingga sampai di Monas dan diberi tempat spesial dengan di sediakan karpet hijau persis di depan panggung untuk kafilah Ciamis. Buku ini bersifat deskriptif naratif, penulis menjelaskan perjuangannya dan para peserta dari mulai keberangkatan sampai ke Jakarta. Jelas sangat berbeda antara buku yang Tulis ole K.H. Nonop Hanafi dengan penelitian penulis. Buku ini hanya menjelaskan pandangan penulis saja sebagai pelaku yang terlibat dalam ABI 212, sedangkan penelitian penulisan kumpulan dan komparasi dari berbagai data serta pandangan orang-orang yang kontra terhadap gerakan ABI 212 ini.

3. Buku yang berjudul Gara-Gara Ahok (Dari Kegaduhan Ke Kegaduhan) karya Ismantoro Dwi Yuwono, Dkk. Buku ini menjelaskan berbagai kontroversi yang dilontarkan Ahok. Pada buku ini dibahas juga perjalanan politik Ahok dari awal hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada akhir buku ini, membahas kegaduhan Ahok yang merangsang tumpahnya jutaan Islam di Jakarta dalam Aksi Bela Islam. Untuk menuntut Ahok, atas perkataan yang kontroversi saat kunjungan ke Pulau Seribu pada tahun 2016. Hemat penulis, perbedaan pembahasan Aksi 212 pada buku ini dengan penelitian penulis adalah dalam segi pemaparan peristiwa Aksi tersebut. Jika pada buku Gara-gara Ahok hanya bersifat deskriptif naratif, dan pembahasan yang dipaparkan hanya sebatas tambahan saja. Adapun pada penelitian ini peristiwa Aksi 212 dipaparkan dengan deskriptif analitis dengan menggunakan ilmu bantu sosial.
4. Desertasi yang ditulis oleh Aziz Rohamnur dengan judul Transformasi Pesan Agama Pada Aksi 212 (Analisis Wacana Kritis Tulisan Amin M. Amien Rais Menyikapi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Pada Rubik Opini Harian Umum Republika Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2016)”. Desertasi yang ditulis oleh mahasiswa S3 pascasarjana UIN Bandung, menjelaskan pandangan Amien Rais melalui tulisannya yang dimuat dalam rubik Republika. Ia juga

menjelaskan transformasi pesan Al-Quran melalui media masa. Salah satu teori yang dipakai dalam disertasi ini adalah teori Emile Durkheim mengenai unsur-unsur agama.

5. Jurnal *Hubungan Agama dan Negara Dalam Perspektif Aksi Bela Islam*, ditulis oleh Yogi Supriadi. Isi tulisan ini, menjelaskan hubungan agama dan negara. Dimana penulis memandang, negara Indonesia cenderung kepada arah sekuler, yaitu memisahkan antara hubungan dengan negara. Aksi Bela Islam, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang modernis jauh dari kata teroris. Dan *issue* agama dalam sebuah pergerakan menjadi hangat kembali. Adapun terdapat perbedaan judul penelitian penulis. Pertama kasus Aksi yang dijadikan analisis pada jurnal ini adalah Aksi 411 sedangkan penelitian penulis adalah Aksi 212. Persamaan dengan penelitian penulis, terletak pada dampak dari Aksi Bela Islam 212 dan analisis hubungannya dengan kontes politik pada yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017.
6. Jurnal berjudul *Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II, dan III*, ditulis oleh Ahmad Sodikin. Tulisan ini dipublikasikan oleh Jurnal MADANI (jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan). Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah jurnal ini membahas gerakan politik Indonesia pasca Aksi Bela Islam. Tidak membahas pada perubahan gerakan politik kala mobilisasi Mas Aksi terjadi. Adapun sedikit persamaan dengan penelitian penulis, adalah pada Bab dampak dari Aksi Bela Islam salah satunya adalah dampak politik.
7. Jurnal Holistik dengan judul *Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212*, ditulis oleh Bagus Riadi dan Diki Drajat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada antara skala global dan nasional. Apabila *framing* yang menjadi sebuah kolektifitas pada penelitian penulis untuk melawan hegemoni pemerintah Indonesia saat itu berkuasa. Adapun analisis *framing* yang dibuat oleh para aktor Aksi pada Aksi Bela Islam adalah untuk melawan hegemoni politik global.

8. Jurnal yang berjudul *Islam Politik di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi*, ditulis oleh Gili Argenti. Terdapat perbedaan dengan penelitian, adapun perbedaannya adalah jika pada jurnal ini menempatkan sosial dan ekonomi pada sebuah perubahan gerakan dari Aksi tersebut. Sedangkan pada penelitian, hal tersebut adalah bagian dari dampak dari terjadinya peristiwa Aksi Bela Islam, khususnya Aksi Bela Islam Jilid III atau ABI 212.

F. Kerangka Teori

Penelitian Gerakan Aksi Bela Islam 212 Tahun 2016 ini, bersifat deskriptif analitis. Maka dari itu perlunya teori-teori sosial untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Menurut Sartono Kartodirjo, sudah hal wajar ketika seorang sejarawan menulis sejarah gaya baru meminjam ilmu sosial sebagai pisau analisisnya. Hal demikian disebabkan, karena *new history* sudah tidak lagi menanyakan tentang apa, siapa, kapan dan dimana. Penulisan sejarah baru sudah melangkah lebih jauh seperti halnya melacak berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, dan lain sebagainya dengan menggunakan pertanyaan *why*, mengapa peristiwa itu terjadi.¹¹ Sartono juga membagi analisis sejarah ke dalam dua sistem. Pertama sistem besar (kultur, bilogi ekologi dan personalitiy), dan kedua sistem kecil yang terdiri dari ekonomi, sosial dan politik. Maka dari itu, tidak mungkin bisa dipungkiri tanpa adanya bantuan ilmu sosial sulit untuk di analisis dan difahami jalan prosesnya. Dari pemaparan tersebut kita bisa melihat bahwa ilmu sosial, dalam hal ini sangat diperlukan dalam menyoroti dimensi baru dan multiperspektif dari berbagai fenomena gejala sejarah.

¹¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 120–23.

Apabila diklasifikasikan, tema yang diangkat ke dalam sebuah penelitian tesis ini masuk ke dalam penelitian gerakan sosial yang melibatkan aksi kolektif. Hasil analisis penulis, dalam menyajikan penelitian ini akan menggunakan *greand* teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly. Charles Tilly adalah seorang sosiolog modern asal Amerika. Tilly lahir lahir di Amerika pada 27 Mei 1927 dan meninggalkan pada 29 April 2008. Beberapa tokoh yang mempengaruhinya diantaranya adalah Karl Marx, Max Weber dan Herbert Spencer.¹² Sebelum lebih lanjut membahas teori gerakan sosial Charless Tilly serta relevansinya dengan kasus penelitian ini. Mari kita fahami apa yang dimaksud dengan gerakan sosial. Menurut Michael Useem, gerakan sosial merupakan tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial. Adapaun menurut pandangan Mayer Zald dan Mc Carthy defines gerakan sosial merupakan upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apa pun yang bernilai secara sosial. Charle Tilly memiliki pandangan berbeda dengan ketiga tokoh di atas. Tilly menambahkan kata persetujuan dalam mengungkapkan pengertian gerakan sosial. Menurut Tilly gerakan sosial adalah upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi yang mengandung persetujuan dan berkelanjutan di antara warganegara dan negara.¹³

Setelah memahami definisi gerakan sosial yang dikemukakan oleh para ahli terutama apa yang dikemukakan oleh Charles Tilly. Terdapat sebuah karakteristik atau ciri dari sebuah gerakan sosial. *Pertama*, gerakan sosial harus melibatkan tantangan kolektif. Artinya dalam sebuah gerakan-gerakan sosial, perlu adanya upaya melakukan organisir untuk bergerak melakukan perubahan di dalam ruang-ruang kelembagaan. Upaya semacam ini bisa dilakukan dengan fokus pada kebijakan-kebijakan publik mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial politik.

¹² Evi Puji Lestari, "Teori Reportoire Oleh Cahrles Tilly", kompasiana.com, 2021, Dikutip Pada 19 Juni 2022, <https://www.kompasiana.com>.

¹³ Tim Penerjemah Paramadina Wiktorowicz, Quintan, *Aktivisme Islam (Pendekatan Teori Gerakan Sosial)* (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm 4.

Kedua, dalam sebuah gerakan-gerakan sosial adanya corak politis yang inheren. Untuk mencapai tujuan hajat politik, biasanya gerakan-gerakan sosial sangat diperlukan. Lewat gerakan sosial ini, tujuan politis untuk menguasai kursi jabatan. Yang nanti dimaksudkan untuk mengatur wewenang dan kebijakan. Adapun tujuan politis yang ditempuh lewat gerakan politik ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi yang *continue* / berkelanjutan dan terus menerus dengan actor politik di luar gerakan. Terdapat perbedaan antara gerakan sosial dengan kelompok-kelompok kepentingan. Perbedaan pertama terletak pada cara keterorganisasian. Kelompok kepentingan dalam memperjuangkan suatu hal mereka mengumpulkan beragam organisasi dari berbagai organ yang berbeda dan disatukan dalam suatu wadah struktur birokratis dalam ikatan yang longgar. Sedangkan gerakan sosial tidak mengorganisir organ-organ atau kelompok-kelompok dalam suatu struktur seperti halnya kelompok kepentingan. Perbedaan kedua, perjuangan yang dilakukan oleh gerakan sosial lebih pada kepedulian pada wilayah public tertentu. Dan gerakan sosial memiliki kepentingan politik lebih luas, meski cakupannya lebih sempit dibandingkan kelompok kepentingan. Tetapi apabila dibandingkan keduanya, gerakan sosial lebih dekat persamaannya dengan kelompok kepentingan dibandingkan dengan partai-partai politik. Adapun perbedaan antara gerakan sosial dengan partai-partai politik adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Gerakan sosial bergerak dengan tujuan ingin mempengaruhi pemerintah saja, sementara partai politik memiliki tujuan untuk berkuasa langsung menjadi pemerintah. Seperti halnya gerakan yang tergabung dalam Aksi Bela Islam 212. Mereka tidak hanya berhenti di aksi 212 atau jilid III. Aksi jilid-jilid yang lainnya pun terus mereka lakukan. Bahkan lebih dari itu, membentuk alumni 212 untuk mengontrol pemerintah dengan kritikan-kritikannya.
- b. Gerakan sosial tidak terkait langsung saat terjadi pertarungan politik. Tetapi meski demikian, sebagian dari individu-individu gerakan sosial ada yang

¹⁴ Mohamad Syawaludin, *Sosiologi Perlawanan* (Sleman: DEEPUBLISH, 2017), hlm 43.

terikat langsung. Berbeda dengan partai politik, mereka terlibat dan terkait langsung saat kontestasi politik berlangsung. Karena tujuan partai politik adalah untuk mengontrol pemerintah secara langsung dengan cara mencalonkan kadernya untuk masuk ke dalam tubuh pemerintah.

- c. Cakupan kepentingan gerakan sosial hanya fokus pada sedikit wilayah saja. Seperti misalnya contoh kepentingan politik yang diperjuangkan oleh elite-elite ABI 212, hanya untuk mendorong Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Sementara *platform* partai politik mencakup semua wilayah. Gerakan sosial dan kelompok kepentingan hanya fokus pada suatu persoalan. Misalkan contoh gerakan ABI 212, mereka hanya fokus pada persoalan agama.

Charles Tilly berpandangan bahwa gerakan sosial itu bersifat dinamis tidak statis. Karena gerakan sosial adalah memperjuangkan keadilan dan ketidakpuasan bukan sebuah ekspresi politik. Menurut Tilly ada tiga unsur utama dalam sebuah gerakan sosial. *Pertama*, mengkampanyekan upaya public yang berkelanjutan dan terorganisir yang membuat klaim kolektif atas otoritas target. *Kedua*, repertoar dan perseteruan. Yaitu kombinasi diantara bentuk tindakan politik berikut: pembentukan asosiasi dan koalisi dengan tujuan khusus, pertemuan public, prosesi khidmat, unjuk rasa/ demonstrasi, pernyataan kepada media public dan pamphlet. *Ketiga*, menampilkan, diantaranya: peserta bersama perwakilan publik yang layak, persatuan, dan komitmen pada bagian dari diri mereka sendiri / daerahnya sendiri.¹⁵

Selanjutnya Tilly pun memiliki pandangan bahwa gerakan sosial tidak hanya melakukan satu kali gerakan, tapi terus bergerak melakukan proses transformasi dari satu perubahan ke perubahan lainnya. Kondisi *contention relation* atau hubungan pertikaian merupakan salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial. Maksud *repertoire* yang dikemukakan oleh Tilly melalui teorinya, adalah sebagai alat

¹⁵ Syawaludin, hlm 43-44.

yang berfungsi sbagai taktik aksi kolektif. Lebih lanjutnya Tilly menjelaskan, bahwa *repertoire* adalah sebagai konsep kerja untuk mengidentifikasi berbagai bentuk dari tindakan perlawanan dan sebagai suatu cara untuk menyampaikan tuntutan yang dilakukan oleh kelompok subordinate. Dan apa yang dikemukakan oleh Tilly dipertegas oleh Verta Taylor dan Dyke. Konsep yang dikemukakan oleh Tilly merupakan penyempurnaan dari konsep mobilisasi. Adapun repertoar lebih menekankan pada kajian tindakan kolektif yang dapat dikembangkan dan dianalisis melalui pendekatan sejarah perjuangan.¹⁶

Repertoire yang ditawarkan Tilly, tidak hanya eksistensi di kalangan level atas saja, bisa saja *reporoire* tersebut eksis di kalangan bawah secara kolektif menyampaikan tuntutan dimana saja dan kapan saja. Berbeda halnya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Torrow dan MC Adam. Ia mengatakan bahwa *repertoire* klektif dapat di rekognisi apabila dilakukan oleh sekumpulan gerakan sosial secara khusus. Pandangan Tilly tersebut dapat dibuktikan dengan aksi kolektif 212. Aksi ini berawal dari gerakan-gerakan kecil, bahkan berkumpulnya jutaan orang monas bisa dimotori dengan gerakan-gerakan kecil dari berbagai daerah yang ikut serta ke Jakarta. Bahkan sebagai mereka yang tidak bisaikut secara langsung berjmaah di Monas, mereka melangsungkan aksi dan doa bersama di daerahnya masing-masing, dan itu pun mendapat perhatian dan pengakuan dari pemerintah daerahnya sendiri. Konsep pemikiran Tilly, bahwa repertoar dapa dimanfaatkan dengan menghimpun bentuk aksi-aksi umum yang berorientasi ditujukan pada pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Jadi repertoar itu bergerak secara dinamis, dari level lokal ke level nasional dengan memanfaatkan bentuk-bentuk aksi seperti yang terjadi pada gerakan ABI 212. Bahkan lebih luasnya Tilly berpandangan pergerakan suatu aksi itu bisa bergerak dari yang awalnya kondisi biasa bergerak ke kondisi dinamis dengan maksud mempercepat capaian tujuan yang diharapkan. Sehingga Tilly membagi repertoat ke dalam dua bagian. pertama repertoar yang bersifat umum. Yang dimaksud repertoar

¹⁶ Syawaludin, hlm 52.

secara umum yaitu aksi yang cakupannya lokal tidak parochial. Kedua repertoire bersifat khusus, yakni *repertoire* bersifat langsung, terbuka dan dilakukan oleh gerakan sosial.¹⁷

Terjadinya suatu gerakan sosial secara kolektif yang dimotori oleh actor-aktor yang memiliki pengaruh besar, bukan disebabkan oleh periode pemerintah. Baik itu periode pemerintah yang bertindak represif terhadap rakyatnya, maupun sikap pemerintah yang terbuka. Hemat Tilly, kondisi interest merupakan sesuatu yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama untuk diperjuangkan secara bersama. Menurut Tilly, maksud interest disini ialah faktor yang terkait dengan politik dan ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap aksi-aksi gerakan sosial. Menurut Tilly, peran aktor kharismatik dalam sebuah repertoire memiliki pengaruh besar. Pengaruh tersebut salah satunya dapat mempercepat proses pembentukan strategi dan taktik inovatif. Hadirnya jutaan umat muslim di Monas, tidak bisa dipungkiri merupakan hasil strategi yang diciptakan oleh para habaib dan para ulama lainnya dalam membingkai *framing* sehingga kelangsungan aksi bisa berjalan dengan tertib.

Hadirnya aktor-aktor kharismatik tersebut dapat membangun budaya kritis masyarakat, atau dikenal dengan konsep *cultural broker*. Apabila mengikuti konsep apa yang disampaikan oleh Hiroko Horikoshi, *cultural broker* tersebut ialah tokoh-tokoh kharismatik seperti kiayi, ulama dan habaib. Tokoh-tokoh yang disebutkan tersebut berfungsi sebagai mediator bagi sebuah perubahan besar dalam masyarakat. Bahkan otoritasnya sebagai tokoh agama akan tertutup oleh fungsinya sebagai penggerak kekuatan politik lokal.¹⁸ Hal demikian dapat dibuktikan oleh aktor-aktor penggerak dalam ABI 212. Para ulama dan habaib, seperti yang dilakukan oleh K.H.Nonop Hanapi pelopor *longmarch* Ciamis-Jakarta menjadi penggerak dan mediator untuk melakukan perubahan dengan mengambil alih sebagai mediator untuk menyampaikan aspirasi melalui menggerakkan santri-santri dan masyarakat Ciamis dan

¹⁷ Syawaludin, hlm 67.

¹⁸ Syawaludin, hlm 71.

sekitarnya. Adapun inti dari peta teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Tilly dalam menganalisis perkembangan dan kesuksesan gerakan sosial ada tiga kunci. Pertama mobilisasi sumber daya. Kedua, peluang politik. Dan ketiga pbingkaian atau *framing*. Selain itu pula Tilly menambahkan, dalam sebuah aksi kolektif harus mencakup dua komponen tambahan diantaranya adalah kepentingan bersama (*common interest*) dan *organization* atau organisasi. Sementara untuk menjelaskan fenomena gerakan Aksi Bela Islam 212 secara spesifik akan menggunakan *middle* teori Quintan Wiktorowich, yaitu Aktivisme Islam melalui Pendekatan Teori Gerakan Sosial. Konsep yang ditawarkan oleh Quintan bermuara pada apa yang dikemukakan oleh Charles Tilly.

Apabila melihat sejarah, teori gerakan sosial ini mulai buming pada dekade tahun 70 an. Kala itu, para penulis, pemikir dan peneliti, sudah tidak lagi fokus pada ideologi, tetapi lebih menekankan pada aktivisme Islam, yang dapat memobilisasi gerakan politik Islam. Teori aktivisme Islam ini adalah antitesis dari aliran strukturalis yang berfokus pada sistem dan *madzhab* rasionalis yang berfokus pada peran individual. Teori Akitivisme Islam menawarkan suatu terobosan, dengan menjadikan kelompok sebagai objek analisis. Menurut Quintan, individu yang terlibat aksi kolektif memiliki pilihan bebas, teori gerakan sosial menjelaskan bahwa pilihan itu tidak terjadi di dalam ruang hampa, di luar konteks, relasi, dan jaringan yang berubah. Jadi, pilihan individu tidak bisa dipahami di luar konteks sosial kelompok.¹⁹

Sejalan dengan apa yang ditawarkan Tilly, dalam menentukan hkeberhasilan aksi secara kolektif, terdapat tiga kosep kunci yang harus menjadi pegangan. Adapun tiga konsep tersebut adalah sebagai berikut : *pertama*, struktur kesempatan politik. *Kedua*, struktur mobilisasi, dan *ketiga* pbingkaian aksi atau *action framing*. Menurut kunci pertama bahwa gerakan-gerakan sosial seringkali disebabkan oleh perubahan struktur kesempatan politik dan peralihan kekuasaan pada kontes politik. Bahkan

¹⁹ Quintan Wiktorowicz, *Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin*, red Noorhaidi Hasan (India: Indiana University Press, 2004), 243–44.

setelah keduanya redup, gerakan pun kadang ikut meredup. Relevansi dengan judul penelitian ini adalah Aksi Bela Islam yang terjadi pada tahun 2016, yang diawali dari Aksi Bela Islam Jilid I, Jilid II, dan puncaknya pada Jilid III atau 212 mampu memobilisasi lebih banyak lagi. Disebabkan oleh adanya indikasi politik. Perubahan gerakan yang awalnya gerakan ke gerakan politik, adalah karena adanya isu bahwa tersangka (Ahok) akan naik mencalonkan diri sebagai Gubernur. Sehingga adanya aksi tersebut dijadikan kesempatan untuk menjegal kemenangan Ahok. Sehingga apabila kita lihat secara jumlah, Aksi 212 perbedaannya sangat signifikan dengan Aksi Jilid I dan II.

Adapun kunci kedua yaitu struktur mobilisasi. Menurut Quintan, struktur politik saja tidak cukup, butuh yang namanya mobilisasi masa. Dalam memobilisasi biasanya lebih mudah dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang sebelumnya telah terjalin. Baik itu melalui jaringan ormas, LSM, maupun akademik. Melalui jaringan inilah masa aksi direkrut dan dimobilisasi. Hanya saja, dalam perekrutan masa aksi tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan juga.

Kunci ketiga untuk menentukan gerakan masa aksi adalah *framing* atau pembingkaihan. Mengumpulkan masa dengan volume besar memang tidak mudah, maka untuk menarik masa dibutuhkan yang namanya *framing*. Konsep istilah *framing* pada awalnya dikenalkan oleh Ervin Goffman dalam sebuah kajian gerakan sosial. Menurut Goffman, *framing* merupakan sebuah skema penafsiran yang bertujuan untuk menggiring individu untuk menemukan, merasakan, dan mengidentifikasi. Di sisi adanya *framing* dapat membuat peristiwa akan lebih bermakna. Melalui proses *framing* akan lebih membantu secara masif untuk menarik perhatian media dan memobilisasi pengikut yang nantinya dapat dihimpun menjadi keanggotaan.²⁰ Proses ini berhasil dilakukan oleh para penggerak ABI 212. Keberhasilan untuk menarik media sukses dilakukan, terbukti yang meng *expose* dan hadir saat berlangsungnya 212 bukan saja Tv

²⁰ Zainut Tauhid Sa'adi, *Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia Di Ruang Publik Digital* (Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS, 2021), hlm 52.

nasional tapi disana juga hadir dari media Mancanegara seperti Thailand dan China. Dalam menarik keanggotaan para penggerak ABI 212 berhasil membuat wadah yang disatukan dalam “Alumni 212”.

Adapun menurut David Snow, *framing* sedikitnya memiliki tiga fungsi bagi gerakan sosial. *pertama*, fungsi pertama pembingkai dalam sebuah gerakan sosial adalah sebagai *diagnostic framing*. Adanya pembingkai dimaksudkan untuk mendiagnosa beberapa aspek kehidupan sosial yang dimaksudkan untuk melihat persoalan atau masalah yang membutuhkan perubahan, dan hubungan sebab akibat. *Kedua*, *prognostic framing* / pembingkai prognostik. Maksudnya adalah fungsi pembingkai yang kedua sebagai solusi atas masalah yang sedang terjadi, yang di dalamnya mencakup strategi, taktik dan target tertentu yang akan dijadikan sebagai obat atau solusi atas terjadinya ketidakadilan. Dalam hal ini dilakukan oleh penggerak ABI 212, dimana yang awalnya hanya bentuk protes agar Ahok diadili karena telah menghinakan kitab suci Al-Quran, berlanjut hingga protes terhadap minta solusi ketidakadilan rezim Jokowi. *Ketiga*, *motivational framing* / pembingkai motivasional. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk berjuang serta diiringi dengan alasan-alasan agar yang diberikan motivasi iktu terlibat dalam tindakan kolektif.²¹

Selain itu, salah satu point penting dari proses *framing* dalam sebuah gerakan adalah *frame resonance* atau resonansi bingkai. Mengutip dari pendapat Benford dan Snow, keberhasilan resonansi bingkai ditentukan oleh dua faktor. Pertama tergantung bagaimana kebenaran atau kredibilitas suatu bingkai yang disodorkan. Kredibilitas *framing* tergantung pada tiga faktor yaitu konsistensi bingkai, kredibilitas empiris, dan kredibilitas articulator atau pembuat klaim. *Kedua*, arti penting relative dari bingkai tersebut.

²¹ Sa'adi, hlm 54.

Ideology merupakan salah satu cara untuk mengefektifkan sebuah *framing*. Biasanya ideology sebagai suatu komponen ide dan kepercayaan akan bekerja secara maksimal apabila dijadikan sebagai seni untuk menarik masa. Karena dengan ideologi, ruang-ruang individu yang hampa akan terisi, sehingga sentiment-sentimen akan hadir dan menyadarkan individu untuk bergerak. Seperti halnya yang dikatakan Snow, yang dikenal dengan sebutan proses penajajaran bingkai. Penajajaran bingkai tersebut memiliki makna sebagai keterkaitan antara orientasi penafsiran individu dan gerakan sosial. Sehingga beberapa kepentingan, nilai, dan keyakinan individu saling melengkapi dan sesuai dengan aktivitas, tujuan, dan ideologi gerakan sosial.

Metode memiliki arti sebuah cara untuk digunakan oleh peneliti dengan cara terencana, sistematis dan dapat mengambil suatu kesimpulan secara objektif. Dikutip dari buku yang berjudul Pengantar Metodologi karya Dr. Rifa'I Abubakar, penelitian sejarah merupakan sebuah penelitian masuk pada jenis / kelompok penelitian menurut pendekatan. Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa penelitian sejarah merupakan sebuah penelitian dengan tujuan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu secara objektif melalui pengumpulan data.²²

Selain memakai metode penelitian sejarah yang akan dipaparkan dibawah ini, penulisan tesis ini juga akan ditambah dengan metodologi pendekatan sosiologi sebagai analisis peristiwa dan sebagai karaktersistik penelitian *new history*. Karakter penulisan sejarah gaya baru atau *news history*, tidak hanya memotret kelas-kelas yang besar saja seperti misal sultan-sultan, raja, atau presiden saja, tapi kelas-kelas bawah dari mulai patih sampai pada pembantu sekalipun perlu dipotret juga. Munculnya sejarah sosial memberikan warna baru dalam *historiografi*. Maka dari itu, perlunya sejarah dengan ilmu bantu lain atau bahasa lainnya memadukan ilmu sejarah dengan ilmu lain, seperti halnya bantuan ilmu sosiologi. Hal tersebut dilakukan agar gejala-

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm 2-6.

gejala peristiwa sejarah yang dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat bisa disajikan secara menarik.

Dari sekian banyak aliran sejarah sosial yang berkembang, terdapat empat aliran sejarah sosial, yang masing-masing dari aliran tersebut memiliki karakteristik sendiri. Diantara keempat aliran tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, aliran *empiris positifis*. Ciri dari aliran ini adalah memandang objek sejarah sama halnya dengan objek kajian fisika yaitu alam. *Kedua*, aliran *annals* atau aliran struktural. Karakter dari aliran *annals* adalah memotret sejarah secara bersekala bear yang berlandaskan pada geografi dan ekonomi. *Ketiga*, aliran sejarah individualis. Ciri dari aliran ini lebih menekankan bahwa kenyataan sejarah terjadi atas dasar kesadaran individu. Dan yang *keempat* aliran *struktural fungsional* atau *struktural sistematis*.²³

Selain teori Tilly dan Quintan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, hemat penulis perlu adanya pendekatan untuk mempertajam pemaparan isi penelitian. pendekatan yang tepat dalam memaparkan penelitian ini adalah melalui pendekatan strukturis. Metodologi stukturis merupakan aliran antitesa atas jawaban aliran individual dan struktural. Metodologi stukturis ini menggabungkan antara peran individu dan stuktural, keduanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tokoh pencetus filsafat strukturis ini adalah Anthony Gidden. Ia adalah seorang filusup modern dari Inggris yang lahir pada 18 Januari 1938. Di tahun 1984, Giddhen menerbitkan sebuah buku yang merupakan karya fenomenalnya dengan judul *The Constitution Society Outline Of The Theory of Strukturation*. Hingga satu tahun sesudahnya yaitu pada tahun 1985, Gidden diangkat sebagai Profesor Sosiologi di Universitas Cambridge. Pemikiran teoritis Gidden bukan saja dikenal dan diterima di tanah kelahirannya Inggris, lebih dari itu menyebar juga ke berbagai belahan dunia lainnya seperti Amerika Serikat dan negara-negara besar

²³ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 188–89.

lainnya. Bahkan pengaruh pemikirannya lebih besar di negara Amerika Serikat dibandingkan dengan di negara Inggris.²⁴

Adapun relevansi strukturalisme filsafat Giddens dengan judul penelitian ini adalah perlu kita bersama bahwa gerakan Aksi Bela Islam 212 tahun 2016 ini bukan saja gerakan yang diciptakan oleh individu semata seperti misalnya Ahok sebagai pelaku atau *agent* yang dianggap menodai agama, maupun Habib Rizik sebagai pemimpin aksi yang menggerakkan para demonstran untuk ikut aksi di Jakarta. Lebih dari itu, gerakan aksi bela Islam ini adanya gabungan dengan struktur-struktur lainnya terutama struktur sosial politik dan ekonomi yang berhasil menciptakan aksi menjadi besar. *Farm* utama yang dibangun untuk menyentuh individu agar ikut aksi adalah *farm* ideology agama, meski pada akhirnya terjadi perubahan menjadi sebuah gerakan politik yang dimanfaatkan oleh para elit-elit politik untuk mencapai kepentingannya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, gerakan ini juga bukan termasuk kepada gerakan fundamentalis, karena pada faktanya di lapangan banyak dari ormas-ormas Islam yang bukan tergolong kepada gerakan Islam fundamentalis ikut terlibat di dalamnya. Metode strukturalisme yang ditawarkan Giddens memiliki tujuan untuk menemukan *causal power* atau kekuatan yang menarik. *Causal power* tersebut diperoleh karena adanya interaksi antara *agent* dan struktur sosial. Selanjutnya, sedikitnya ada empat unsur pokok dalam metode strukturalisme diantaranya adalah sebagai berikut : penarik kekuatan, agen yang tersedia, mental atau emosi dan yang membatasi.²⁵

G. Metode Penelitian

Salah satu komponen yang wajib ada dalam sebuah penelitian sejarah ilmiah adalah metode penelitian. Pada penulisan penelitian Gerakan Aksi Bela Islam 212

²⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 936–37.

²⁵ Setia Gumilar, “Dinamika Gerakan Politik Ulama di Garut 1998-2007” (Universitas Indonesia, 2013), hlm 24.

tahun 2016 ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang sudah disepakati para sejarawan yang terdiri dari empat langkah. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Menurut Notosusanto, heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penajajakan, pencairan, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun lisan.

Pada tahap pertama, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Mengumpulkan sumber yang diperlukan dalam penulisan merupakan pekerjaan pokok yang dapat dikatakan gampang-gampang susah, sehingga diperlukan kesabaran dari penulis. Pada tahap heuristik, bukan saja menguras tenaga semata. Tetapi pikiran pun ikut terkuras. Maka dari itu, seorang penlitit perlu membuat strategi agar sumber-sumber yang dicari dapat terkumpulkan.²⁶

Dalam tahapan heuristik penulis mencari ke beberapa tempat seperti kantor-kantor ormas yang terlibat dala Aksi Bela Islam 212, ke rumah pelaku atau saksi sejarah, perpustakaan dan lain sebagainya. Karena penelitian ini bersifat kontemporer, tentu penulis pun dalam pencairan sumber bukan hanya di lapangan saja, dengan kemajuan teknologi penulis mencari juga berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian melalui media sosial. Secara umum sumber dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

²⁶ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm 93.

1. Bentuk Tulisan

- a) Buku yang berjudul *Gara-Gara Ahok* yang ditulis oleh Ismantoro Dwi Yuwono, dkk.
- b) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MUI
- c) Selebaran surat edaran ajakan jihad konstitusi bela agama dan negara
- d) Koran online dengan judul *Pakar: Aksi Bela Islam II Jadi Besar Karena Dua Faktor*, *Republika.co.id*, Kamis 08 Desember 2016, 18:42 WIB
- e) Koran online CNN, dengan judul *Ahok Sang Pemicu Rentetan Aksi Bela Islam dan Nama Besar 212*, diterbitkan Selasa 22-01-2019, Pukul 09:48.
- f) Koran online *newdetik.com* dengan judul *Habib Qizieq Sebut Massa Aksi 2 Desember 7,5 Juta Orang, Begini Analisisnya*. Diterbitkan pada 05 Desember 2016.

2. Bentuk Lisan

- a) Pernyataan Kontroversi Ahok di Pulau Seribu yang diunggah oleh Buni dalam media Youtube
- b) Wawancara dengan K.H. Titing Kamaludin Barzi Pelopor *Longmarch* Ciamis-Jakarta.
- c) Wawancara dengan Abah Haikal (48 tahun), peserta Akis Bela Islam 212
- d) Wawancara dengan Riyan, Alumni Aksi Bela Islam 212

b. Sumber Skunder

1. Tulisan

- a) Jurnal pemikiran Sosiologi dengan judul *Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke*

- Komunitas Luring*, ditulis oleh Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani.
- b) Jurnal berjudul *Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II, dan III*, ditulis oleh Ahmad Sodikin. Tulisan ini dipublikasikan oleh Jurnal MADANI (jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan).
 - c) Jurnal Holistik dengan judul *Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212*, ditulis oleh Bagus Riadi dan Diki Drajat.
 - d) Jurnal yang berjudul *Islam Politik di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 dari Gerakan Demonstrasi ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi*, ditulis oleh Gili Argenti
 - e) Desertasi yang ditulis oleh Rohmanur Aziz, dengan judul “Transformasi Pesan Agama Pada Aksi 212 (Analisis Wacana Kritis Tulisan Amin M. Menyikapi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Pada Rubrik Opini Harian Umum Republika Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2016)”. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

2. Kritik

Pada tahap ini, sumber yang telah dikumpulkan pada tahapan heuristik baik berupa buku, wawancara pelaku dan saksi, koran, maupun dokumen-dokumen lainnya. Yang tentunya memiliki relevansi dengan pembahasan yang terkait. Selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya terjamin.

Proses kritik dalam metode penelitian sejarah meliputi dua tahap, pertama kritik eksternal dan kedua internal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern atau kritik luar dilakukan untuk meneliti keaslian sumber, apakah sumber tersebut valid, asli atau bukan tiruan? Sumber tersebut utuh, dalam arti belum berubah, baik bentuk maupun isinya. Karena selama ini, banyak yang menganggap bahwa data itu valid atau *autentik*. Padahal tak sedikit banyak dokumen-dokumen yang bermasalah pada autnetsitas, terutama pada sumber-sumber klasik. Pada tahapan kritik ini, kerja seorang sejarawan sama dengan kerja seorang hakim dan polisi. Dimana mencoba menguji sebuah dokumen yang sejati, dari suatu tipuan dan misrepesentrasi.²⁷

Pada tahap kritik ekstern, penulis akan melakukan kritik terhadap berbagai sumber yang penulis temukan pada tahapan heuristik. Sumber-sumber yang di dapatkan penulis secara fisik masih utuh baik itu yang berupa buku, dokumen maupun wawancara. Berhubung penelitian ini bersifat kontemporer, selain pelacakan di lapangan, penulis pun melakukan pelacakan untuk mengetahui autentikan sumber tersebut melalui internet. Seperti salah satu contohnya adalah selebaran ajakan jihad konstitusi yang beredar di lapangan dan beredar juga di internet. Adapun pelacakan pada tahap wawancara kepada saksi atau pun pelaku, dibuktikan dengan kartu identitas dan foto foto baik yang ia upload di facebook, instragram dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan, apakah ia benar sebagai ketua ormas atau peserta aksi yang ikut terlibat pada peristiwa 212 atau jangan-jangan hanya pengakuan saja.

²⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, red Nugroho Notosusanto (Jakarta: UII Press, 2008), 98.

Dengan adanya bukti-bukti yang disebutkan diatas, validitas ia terlibat bisa terdeteksi.

b. Kritik Intern

Kritik intern atau kritik isi sumber dilakukan untuk menyelidiki sumber yang berkaitan dengan sumber masalah penelitian. Tahapan ini menjadi ukuran objektivitas penulis dalam mengelaborasi data atau sumber yang telah diperolehnya, dan tentunya mengedepankan prioritas.²⁸ Pada tahapan ini, penulisan melakukan kritikan terhadap substansi dari sumber-sumber yang ditemukan pada tahapan heuristik. Setelah melalui analisis dan kritikan pada sumber sumber yang ditemukan, hemat penulis isi-isi yang terdapat pada sumber tersebut relevan dengan penelitian yang penulis angkat.

Penulis melakukan sinkronasi antara isi yang disampaikan oleh pelaku atau saksi dan sumber-sumber tulisan. Salah satu contohnya, terkait pernyataan salah satu peserta yang ikut aksi, ie memberi pernyataan bahwa Aksi Bela Islam 212, tidak bisa dipungkiri indikasi-indikasi politik memang ada. Meski memang motivasi awal datang ke Jakarta untuk membela Al-Qur'an. Hanya saja ada isu juga bahwa tersangka (Ahok) akan naik mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu contoh lagi, substansi Surat Keputusan MUI yang diterbitkan 2016 lalu, secara isi sama seperti yang penulis ambil dari internet saat ini.

3. Interpretasi/ Penafsiran

Interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis artinya menguraikan. Secara etimologi berbeda dengan sintesis, yang memiliki arti menyatukan. Analisis dan sintesis dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi. Pada tahapan Interpretasi atau penafsiran sejarah seorang *mufassir*

²⁸ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, 101–2.

atau dalam hal ini sejarawan, terkadang terjerumus pada subjektifitas. Meski demikian, tahap interpretasi tetap harus ditempuh. Karena mustahil tanpa seorang sejarawan data yang ditemukan bisa bicara dengan sendirinya.²⁹ Mengutip dari pernyataan Sulasman, data tanpa penafsiran sejarawan bagaikan ikan tak bernyawa dalam artian mati tak berguna. Bukti-bukti sejarah yang merupakan saksi bisu atas peristiwa sejarah tidak berarti apa-apa jika belum diberi penafsiran.

Pada tahap penafsiran ini, sejarawan dituntut untuk jujur. syarat untuk terhindar dari kebohongan dan subjektivitas adalah sejarawan harus dapat membebaskan diri dari semua kecenderungan pikiran dan kemauan., tidak boleh memihak dan harus mengabdikan pada kebenaran. Berkaitan dengan interpretasi atau penafsiran sejarah, peran sejarawan sangat penting. Tugas sejarah adalah melaporkan peristiwa yang merupakan fakta masa lalu dan menguraikan hubungan antar peristiwa yang telah terjadi, sehingga membentuk gambaran lengkap. Hubungan antar peristiwa yang terjadi dijalin dengan memberikan tafsiran dan ulasan sehingga mudah dipahami. Laporan itu akan mengandung arti sejarah, apabila rentetan peristiwa diberi tafsiran atau interpretasi sehingga membentuk gambaran yang dapat memberi pengertian tentang masa lalu.

Dalam memandang sebuah peristiwa sejarah sosial hemat penulis terdapat dua pandangan. *Pertama*, pandangan subjektif penulis. *Kedua*, pandangan teoritis. Pandangan yang kedua ini, sangat perlu dilakukan dalam menguraikan dan menganalisis sebuah peristiwa sosial. Karena jika suatu tulisan hanya disajikan sebagaimana yang penulis dapatkan di lapangan, maka akan terlihat biasa-biasa saja atau kurang menarik hasil yang di dapatkannya.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: BENTANG, 2005), 101–3.

4. Historiografi

Setelah menyelesaikan tahap 1, 2 dan 3. Selanjutnya seorang penlit masuk pada tahapan Historiografi. Arti Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Pada tahapan ini, seorang sejarawan dituntut bukan saja pandai dalam memaparkan dari kutipan-kutipan saja. Tapi lebih dari itu, seorang sejarawan harus menggunakan akal pikirannya untuk menganalisis dan mengkritik, yang nantinya akan menghasilkan suatu penuisan yang utuh yang disebut historiografi.³⁰

Adapun Historiografi penelitian yang berjudul Gerakan Aksi Bela Islam 212 Tahun 2016 ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

2. BAB II : PROSES TERJADINYA AKSI BELA ISLAM 212

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Bela Islam 212
- b. Prsoses Mobilisasi Masa / Berlangsungnya Aksi Bela Islam 212
- c. Potret Berlangsungnya Aksi Bela Islam 212

3. BAB III : POTRET DIBALIK GERAKAN AKSI BELA ISLAM 212

- a. Maksud dan Alasan Ahok Menyinggung Surah Al-Maidah Ayat 51 Dalam Pidatonya di Kepulauan Seribu
- b. Deretan Kasus Penodaan Terhadap Agama Oleh Tokoh Publik di Indonesia
- c. Pro_Kontra Pandangan Para Tokoh Nasional Terhadap Tafsir Surah AlMaidah Ayat 51 Potret Dibalik Gerakan Aksi Bela Islam 212
- d. Gerakan Politik Dibalik Aksi Bela Islam 212

³⁰ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 121–22.

4. **BAB IV : DAMPAK AKSI BELAS ISLAM 212 TERHADAP PILKADA
DKI JAKARTA 2017 DAN PILPRES 2019**

- a. Dampak ABI 212 Terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017
- b. Dampak ABI 212 Terhadap Pilpres 2019
- c. Dampak Pendidikan
- d. Dampak Sosial Keagamaan
- e. Dampak Ekonomi

5. **BAB V**

Penutup

